

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul **Disparitas Putusan Pengadilan Dalam Kewenangan Mengadili Sengketa Ekonomi Syari'ah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri)** bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis terjadinya disparitas putusan pengadilan tentang kewenangan mengadili perkara ekonomi Syaria'ah yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis dasar perbedaan putusan dalam penyelesaian perkara ekonomi syari'ah yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) antara lembaga Pengadilan tersebut.

Metode dalam penulisan tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang artinya penelitian ini dikaji dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini penemuan data-data di lapangan berupa dokumen-dokumen putusan Pengadilan Agama dan Putusan Pengadilan Negeri yang dijadikan dasar oleh penulis sebagai data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada, penulisan ini bersifat induktif analitis. Permasalahan penelitian ini dianalisis dengan teori keadilan.

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan mengenai disparitas putusan pengadilan dalam kewenangan mengadili sengketa ekonomi syari'ah yang Diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah bahwa terjadinya peberbedaan (disparitas) putusan tentang kewenangan mengadili perkara ekonomi Syari'ah yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumena (LPKSM) antara hakim pada pengadilan agama dan pengadilan negeri disebabkan adanya perbedaan pandangan terhadap kewenangan mengadili perkara ekonomi Syari'ah yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumena (LPKSM), hakim pengadilan agama berpendapat bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen tidak termasuk dalam subyek hukum dalam masalah ekonomi syariah (tidak punya legal standing dalam perkara ekonomi syariah yang diajukan ke peradilan agama), meskipun perkara ekonomi syariah adalah kompetensi absolut peradilan agama, namun berdasarkan Pasal 46 ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah aturan yang bersifat khusus tentang gugatan perlindungan konsumen yang diajukan oleh lembaga perlindungan konsumen, karenanya perkara tersebut bukan merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama melainkan kewenangan absolut Peradilan Umum.

Kata Kunci : *Disparitas, Putusan Pengadilan, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)*

ABSTRACT

The research entitled Disparity of Court Decisions in the Authority to Adjudicate Shariah Economic Disputes (Analysis of Decisions of the Religious Courts and District Courts) aims to identify, understand, and analyze the disparity in court decisions regarding the authority to adjudicate Shariah economic cases filed by the Non-Governmental Organization for Consumer Protection (LKPD). LPKSM) and To find out, understand, and analyze the basis for differences in decisions in the settlement of sharia economic cases submitted by the Non-Governmental Consumer Protection Agency (LPKSM) between these Court institutions.

The method in writing this thesis uses a sociological juridical approach, which means that this research is studied by looking at the findings of facts in the field which are used as the basis by the author as data obtained from the field in accordance with the facts, this writing is descriptive analytical. The problem of this research is analyzed by the theory of justice.

Based on an analysis of the results of research regarding the problem regarding the disparity of court decisions in the authority to adjudicate shari'ah economic disputes submitted by the Non-Governmental Organization for Consumer Protection (LPKSM) is that there is a difference (disparity) in decisions regarding the authority to adjudicate shari'ah economic cases submitted by the Institute Consumer Protection (LPKSM) between judges at religious courts and district courts due to differences in views on the authority to adjudicate Sharia economic cases submitted by the Consumer Protection Agency (LPKSM), religious court judges are of the opinion that Consumer Protection Institutions are not included in the legal subject in this matter. sharia economics (has no legal standing in sharia economic cases submitted to religious courts), even though sharia economic cases are the absolute competence of the religious courts, based on Article 46 paragraph 2 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is a special rule regarding protection lawsuits consumers filed by consumer protection agencies, therefore the case is not the absolute authority of the Religious Courts but the absolute authority of the General Courts.

Keywords: Disparity, Court Decision, Non-Governmental Organization for Consumer Protection (LPKSM)